

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Solusi Transformasional Kemiskinan di Indonesia

¹Ayuning Budiati, ²Tetty Kurniati¹Universitas Tirtayasa²STIA LAN Bandunge-mail : 1ayoekomara@gmail.com, 2tettykur@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan adalah permasalahan yang masih pelik di Indonesia. Meski terus menurun ditiap tahunnya menurut Balai Pusat Statistik Indonesia, namun kemiskinan harus lebih segera dihilangkan agar pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis solusi transformasional soal kemiskinan di Indonesia. Dengan Teori SDGs atau *sustainable development* dan ditambah dengan pelibatan *local value* maka kemiskinan dapat dikurangi dengan signifikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis dengan perolehan data dilakukan library research. Hasilnya adalah faktor-faktor ekonomi, sosial dan pembangunan fisik harus dilakukan dengan baik agar kemiskinan dapat berkurang dengan ditambah pelibatan *local value*.

Kata Kunci : Kemiskinan, *sustainable development*, *local value*

Transformational Solutions for Poverty in Indonesia

Abstract

Poverty is a complicated problem in Indonesia. In order to reach an effective and efficient sustainable development in Indonesia, it is necessary to conduct an urgent action in poverty eradication. This research aimed to analyse poverty eradication in Indonesia. Researchers used a SDGs theory combined with a local values adoption. This research employed a qualitative research with descriptive analysis method that was a literature reviews technique to gain data. The results stated that various environment factors such as economical, social, and physical should be combined with local values to be used in eradicating poverty in Indonesia.

Keywords : *poverty, sustainable development, local value*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan pelik di negara ini. Baik kemiskinan struktural maupun non struktural. Meski dari tahun ke tahun angka tingkat kemiskinan semakin berkurang, namun soal kemiskinan masih menjadi soal yang pelik di negara Indonesia tercinta. Dengan banyaknya program-program pemerintah melalui Kartu Indonesia Sejahtera, program pinjaman lunak, program koperasi dan program-program lainnya menunjukkan negara ini bekerja keras memberantas kemiskinan. Dengan alasan kemiskinan maka kejahatan meningkat dan peningkatan angka perbaikan gizi dan angka kualitas pendidikan dan tingkat kesejahteraan akan terpengaruh.

Local value memiliki andil dalam kesuksesan penurunan angka kemiskinan. Jadi, meski United Nations telah memiliki program SDGs atau Sustainable Development Goalsnya, namun local value masih perlu dijadikan faktor strategik demi kesuksesan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Kekentalan budaya, agama, kepercayaan, kekerabatan dan gotong royong dapat menjadi faktor pendorong untuk penurunan angka kemiskinan.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

B. PEMBAHASAN

Sustainable Development Goals



Pada bulan April tahun 1987, komisi tersebut mempublikasikan laporan yang diberi judul *Our Common Future*. Laporan itu memuat mengenai kondisi lingkungan serta bagaimana penduduk dunia mengeksplorasi sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui untuk kepentingan hidupnya (bertahan hidup). Inti dari diterbitkannya laporan tersebut adalah perlunya diterapkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). [sebuah tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan proses produktivitas tanpa batas (baik secara natural maupun buatan manusia), dengan cara menggantikan sumber daya yang tidak bisa terbaharui dengan sumber daya lain yang sekiranya tidak akan menurunkan kualitas atau membahayakan sistem biotik alami]. Banyak orang menyetarakan konsep *sustainable development* dengan konsep:

1. *Perlindungan lingkungan (environmental protection)*, atau;
2. *Pertumbuhan ekonomis yang berkelanjutan (sustained economic growth)*.

3 *pertimbangan pembangunan berkelanjutan:*

1. Pertimbangan lingkungan harus menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan ekonomi.
2. Pembangunan berkelanjutan termasuk dalam komitmen kesetaraan sosial yang tidak bisa dihindarkan.
3. Pembangunan tidak semata-mata berarti pertumbuhan (*growth*).

Modal sumber daya alam (*natural capital*).

- a. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*). Contoh: bahan bakar minyak yang berasal dari fosil (bensin, solar).
- b. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Contoh: tenaga surya, angin, tanaman jarak, dsb.

Modal fisik (*psychical capital*).

- a. Sumber daya material meliputi: peralatan, bangunan, mesin, dan infrastruktur lain yang diperlukan dalam sebuah proses produksi.
- b. Kemampuan sumber daya alam untuk menyerap emisi serta polutan yang dihasilkan oleh manusia tanpa menimbulkan efek samping bagi generasi mendatang.

Modal ekonomi (*economic capital*).

Modal inipun dapat berkaitan dengan aset atau fasilitas publik, seperti: rumah sakit, sekolah, sanitasi, transportasi publik yang efisien, perumahan yang baik, fasilitas komunikasi, dsb.

Modal sumber daya manusia (*human capital*).

Modal SDM berhubungan dengan kapasitas yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok individu.

Modal tersebut meliputi:

1. Pengetahuan (*knowledge*).

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

2. Kemahiran (*skills*).
3. Wewenang (*authority*).
4. Atribut lain yang melekat pada diri individu selaku personal, makhluk sosial, maupun makhluk ekonomis.

Modal sosial (*social capital*).

Modal budaya (*cultural kapital*).

Modal budaya berupa apa yang dihasilkan melalui pengalaman bersama (*shared experience*) melalui:

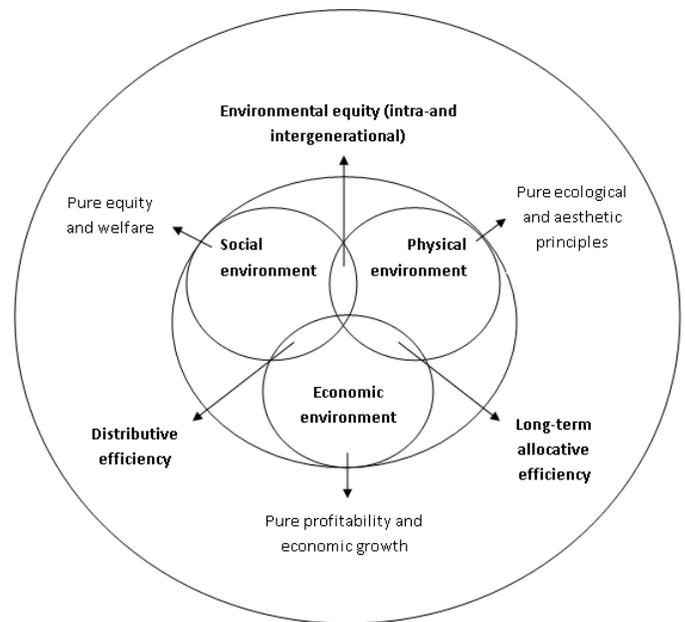
- Tradisi (*traditions*).
- Customs (*adat-istiadat*).
- Nilai-nilai (*values*).
- Warisan budaya (*heritage*).
- Identitas sosial (*identity*).
- Fenomena sejarah (*history*).



Acuan prinsip dan kebijakan keberlanjutan (Camagni, 1996; dikutip dalam Camagni, Capello dan Nijkamp, 2001)

1. *Long-term allocative efficiency*, yaitu menjaga kemungkinan timbulnya dampak jangka panjang atas kondisi kota yang tidak lagi efisien karena menurunnya kualitas lingkungan dan daya tarik kota.

2. *Distributive efficiency* yang berkenaan dengan upaya untuk mempertahankan keberadaan sistem sosial yang adil.
3. *Environmental equity*, yaitu satu kondisi positif yang timbul karena kemampuan pengelola perkotaan untuk menjaga agar dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan karena tekanan sektor ekonomis mampu diminimalisir atau dihindari.
4. Acuan prinsip dan kebijakan keberlanjutan (Camagni, 1996; dikutip dalam Camagni, Capello dan Nijkamp, 2001)



Acuan prinsip dan kebijakan keberlanjutan (Camagni, 1996; dikutip dalam Camagni, Capello dan Nijkamp, 2001)

Menciptakan masyarakat berkelanjutan (Roseland, 2005)

1. Penghijauan kota.
2. Pengelolaan air bersih dan air limbah.
3. Pengurangan dan daur ulang sampah.
4. Efisiensi energi dan penggunaan energi yang dapat diperbaharui.
5. Perubahan kondisi atmosfer dan kualitas udara.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

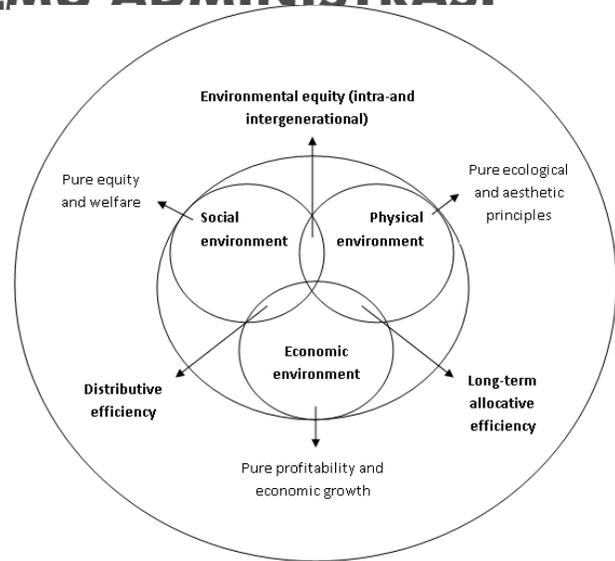
6. Perencanaan transportasi dan manajemen lalu lintas.
7. Alokasi lahan dan tata ruang kota.
8. Perumahan dan perkembangan masyarakat.
9. Konsep pembangunan ekonomis masyarakat.

Sustainable Development Goals dan Local Value di Indonesia

Local value dengan program pengentasan kemiskinannya adalah di Kabupaten KULONPROGO contohnya. Bupati Kulonprogo, cara mengurus daerahnya sangat bertolak belakang dengan pimpinan di pusat yg mengutamakan impor. Apa yang terjadi di Kulonprogo saat ini?

Acuan prinsip dan kebijakan keberlanjutan (Camagni, 1996; dikutip dalam Camagni, Capello dan Nijkamp, 2001)

1. *Long-term allocative efficiency*, yaitu menjaga kemungkinan timbulnya dampak jangka panjang atas kondisi kota yang tidak lagi efisien karena menurunnya kualitas lingkungan dan daya tarik kota.
2. *Distributive efficiency* yang berkenaan dengan upaya untuk mempertahankan keberadaan sistem sosial yang adil.
3. *Environmental equity*, yaitu satu kondisi positif yang timbul karena kemampuan pengelola perkotaan untuk menjaga agar dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan karena tekanan sektor ekonomis mampu diminimalisir atau dihindari.
4. Acuan prinsip dan kebijakan keberlanjutan (Camagni, 1996; dikutip dalam Camagni, Capello dan Nijkamp, 2001)



Acuan prinsip dan kebijakan keberlanjutan (Camagni, 1996; dikutip dalam Camagni, Capello dan Nijkamp, 2001)

Teladan dalam Senyap (belajar nasionalisme ekonomi dan local value dari Kulonprogo)Kulonprogo bukanlah daerah yang jadi sorotan media. Bukan kota besar seperti Bandung, Surabaya, bahkan Jakarta. Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, pun tak sepopuler Kang Emil atau Bu Risma.

Walau tanpa sorotan media, Hasto Wardoyo, telah meletakkan spirit kemandirian sebuah bangsa. Kulonprogo telah melaksanakan economic environment, social environment dan physical environment. Economic environment misalnya dengan peningkatan kesejahteraan rakyatnya dengan perusahaan airnya, koperasinya, pengrajin batiknya dan lain-lain. Local value pun ditingkatkan disini dengan kerajinan batiknya yang sudah turun temurun. Social dan Physical environment dengan perlindungan kesehatan masyarakat dengan melarang merokok dan pembangunan fisik Kulonprogo, seperti fasilitas-fasilitas masyarakat yang ikut menambah kesejahteraan masyarakat.

Ia mengajak warganya keluar dari kemiskinan, dengan kekuatannya sendiri.Hasto memberi teladan dalam senyapnya publikasi. Ia memulai dengan gerakan bela dan beli Kulonprogo.Antara lain, dengan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan para pelajar dan ASN di sana

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

mengenakan seragam batik geblek renteng, batik khas Kulonprogo, pada hari tertentu. Ternyata, dengan jumlah 80.000 pelajar dan 8.000 ASN, kebijakan ini mampu mendongkrak industri batik lokal. Sentra kerajinan batik tumbuh pesat, dari cuma 2 menjadi 50an. Seribuan perajin batik Kulonprogo yang biasanya bekerja di Yogyakarta, kini bisa bekerja di Kulonprogo. Uang ratusan miliar rupiah dari usaha kecil inipun berputar di Kulonprogo. Puryanto, seorang pengusaha batik di desa Ngentarejo, mengaku omzetnya meningkat bahkan pernah hingga mencapai 500 persen. Hasto, yang menjabat Bupati sejak 2011, juga berusaha menjamin pendapatan petani lokal, dengan mewajibkan setiap PNS membeli beras produksi petani Kulonprogo, 10 kg/bulan.

Bahkan beras raskin yang dikelola Bulog setempat, kini menggunakan beras produksi petani Kulonprogo. Sang Bupati yang juga dokter spesialis kandungan ini juga membuat PDAM mengembangkan usaha, dengan memproduksi Air kemasan merk AirKu (air Kulonprogo). Selain menyumbangkan PAD, keberadaan air kemasan ini membangkitkan kebanggaan warga setempat dengan mengkonsumsi air produk sendiri. AirKu kini menguasai seperempat ceruk pasar air kemasan di Kulonprogo. Anto, staf setempat, menuturkan, kini jumlah permintaan lebih besar dari produksi. Karena itu, volume produksi AirKu akan segera ditingkatkan. Berbagai kebijakan lewat Program Bela dan Beli, ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan di Kulonprogo.

Dari 22,54 % pada tahun 2013 menjadi 16,74 % pada tahun 2014 (data Bappeda). Di Kulonprogo, tak akan ditemukan papan iklan rokok. Pemerintah Kulonprogo memang menolak sponsor dari perusahaan rokok. Kebijakan ini tentu mengurangi pendapatan daerah. Namun, memimpin daerah bukan cuma soal menggenjot pendapatan tapi menempatkan posisi moral yang memihak rakyat.

Dalam hal ini, membela hak kesehatan rakyat. Bupati yang lulusan UGM ini juga memberlakukan Universal Coverage dalam pelayanan kesehatan, di mana Pemkab Kulonprogo menanggung biaya kesehatan warganya Rp 5 juta /orang.

Untuk mengimbangi program Universal Coverage, RSUD Wates Kulonprogo memberlakukan layanan tanpa kelas. Artinya, ketika kelas 3 penuh, pasien miskin bisa dirawat di kelas 2, kelas 1, bahkan VIP. Sekali lagi, berbagai kebijakan populis ini dijalankan tanpa banyak sorotan media.

Kemudian, di Kulonprogo Alfaxxx dan Indoxxxx yang biasanya berdampingan sebagai pasangan yang tak terpisahkan itu (di mana ada alfaxxx, di situ ada indoxxxx) tidak diijinkan untuk membuka usahanya, kecuali mau bermitra dengan Koperasi dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Salah satunya kewajiban menampung produk UKM di dalam gerai tersebut dan mempekerjakan karyawan dari anggota koperasi. Alfaxxx dan Indoxxxx yang bekerja sama dengan koperasi, namanya bukan Alfaxxx dan Indoxxxx lagi tapi diganti menjadi TOMIRA (Toko Milik Rakyat). (Sumber @ahmad taufik, 2019).

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Lingkungan ekonomi, sosial dan fisik sangat menentukan dalam pengentasan kemiskinan. Pelibatan local value dalam lingkungan ekonomi, sosial dan fisik sangat berperan signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berbhineka Tunggal Ika. Percepatan pengentasan kemiskinanpun memerlukan komitmen pimpinan daerahnya yang tinggi untuk mengentaskan kemiskinan warganya. *Distributive efficiency* yang berkenaan dengan upaya untuk mempertahankan keberadaan sistem sosial yang adil pun perlu diterapkan.

Rekomendasi

Diperlukan sosialisasi dengan media nasional oleh pemerintah pusat agar dapat ditiru oleh pemerintah daerah lain. Komitmen pimpinan seperti Bupati Kulonprogo perlu di tularkan, dengan demikian program nasional oleh presiden akan sangat efektif untuk penularan komitmen. Pelatihan nasional untuk program SDGs bagi para kepala daerah seluruh Indonesia



3.0 | 2019



STIA LAN
BANDUNG

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

REFERENSI

Camagni, Capello dan Nijkamp. 2001.
Sustainable Development Goals.

United Nations, *Sustainable Development Goals.*

@Ahmad taufik, 2019.
Kulonprogro. <https://www.kulonprogro.or.id>